

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN

*(Desa Lemahino Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara)*

**Yunita Boboros**

**Masje. S. Pangkey**

**Joorie. M. Ruru**

## ABSTRACT

Effective administration of the village is needed to support rural development, namely as a source of documents and information in rural development planning. Therefore, the government continues to make improvements on the village administration, among others, by issuing Regulation Number 32 of 2006 on Village Administration. This study aimed to know how to transform the effectiveness of the administration of the village in the village Lemahino, and the extent of the effectiveness of the implementation of the village administrasi supporting development in rural Lemahino.

This study used qualitative methods. The informants as many as 10 people were taken by using purposive of the various elements of the village government, BPD, LPM, PKK, social organization / social, leaders / village community leaders and villagers. The data was collected using interview techniques and equipped with a documentary and observation techniques. The documents analysis technique used is the qualitative analysis of interactive model of Miles and Hubernann.

Based on these results it can draw the following conclusions: (1) administrative Penyelenggaraan village (village administration books), good public administration, administrative resident, financial administration, and the administration of rural development Lemahino not yet fully effective, but it is good enough. (2) The effectiveness of the administration of the village in supporting development in rural Lemahino pretty good but not maximized.

Conclusions based on these results it is necessary to put forward the following suggestions: (1) The effectiveness of the administration of the village in the village Lemahino should be improved. It urges that must be done is to increase the village administration of human resources, provision of adequate resources allocation, and the provision of facilities and infrastructure of the village administration and adequate representative. (2) The planning of rural development should always be based on documents and information that is accurate and reliable. To the village government and community agencies concerned in the preparation of village development plan should refer to the documents that have been processed in the books related administrative villages.

**Keywords:** village administration, village development.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif merupakan masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang. Sebuah panitia khusus mengenai masalah-masalah administrasi negara PBB menyatakan bahwa salah satu ciri

yang menonjol dari negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah kelemahan-kelemahan administrasi pemerintahannya. Milton Esman (dalam Riggs, 1994) juga menyatakan bahwa sesungguhnya banyak diantara negara-negara sedang berkembang telah menggunakan sistem administrasi

negara/pemerintah dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program kegiatan, tetapi negara-negara sedang berkembang masih penuh dengan gambaran ketidakmampuan administrasinya. Dalam kaitan ini menurut Pamudji (1995) bahwa penyebab keadaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang demikian itu terkait dengan berbagai faktor antara lain adalah struktur organisasi, prosedur, personil aparatur, dan sarana/prasarana pemerintahan.

PP. No. 72 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Schlegel (dalam Sugiono, 2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

### **A. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bagian pendahuluan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah “penyelenggaraan administrasi desa”. Yang dimaksud dengan administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa yang meliputi Administrasi Umum (8 Buku), Administrasi Penduduk (4 Buku), Administrasi Keuangan (7 Buku), dan Administrasi Pembangunan (4 Buku).

Efektivitas penyelenggaraan administrasi desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari sejauh mana penyelenggaraan administrasi desa tersebut dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### **Sumber Data (Informan)**

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Selain data primer, juga dikumpulkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku profil desa, data statistik desa, buku-buku administrasi desa, dan lain-lain. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang data primer.

Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Lemahino Kecamatan Tobelo Utara, yaitu : unsur pemerintah desa, unsur BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur warga masyarakat. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006).

Berdasarkan pendapat tersebut maka metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Metode/teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
2. Pengamatan (*Observasi*). Metode/teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
3. Telaah Dokumen. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Kepala Desa Lemahino.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa fokus penelitian ini adalah penyelenggaraan administrasi desa dalam menunjang pembangunan. Dalam hal ini Administrasi Desa didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, yang terdiri dari : Administrasi Umum (8 Buku), Administrasi Penduduk (4 Buku), Administrasi Keuangan (7 Buku), Administrasi Pembangunan (4 Buku), dan Buku Administrasi BPD (5 Buku). Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas penyelenggaraan administrasi desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari sejauh mana penyelenggaraan administrasi desa tersebut dilakukan

dengan baik dan benar sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Hal-hal yang dikemukakan oleh para informan tersebut dapat menunjukkan bahwa kondisi SDM aparat desa yang belum memadai secara kuantitas dan kualitas, kemampuan keuangan pemerintah desa yang sangat minim, dan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan faktor-faktor yang turut menyebabkan efektivitas penyelenggaraan administrasi desa di desa Lemahino belum optimal. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa tingkat efektivitas penyelenggaraan administrasi desa yang belum optimal di desa Lemahino setidaknya disebabkan antara lain karena masih minimnya atau tidak memadainya ketiga unsur administrasi (SDM, dana/uang, sarana dan prasarana) tersebut. Namun sejauh mana hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan efektivitas penyelenggaraan administrasi desa perlu dilakukan penelitian tersendiri.

Penyelenggaraan administrasi desa secara efektif akan menunjang bagi keberhasilan pembangunan desa tersebut, terutama dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Artinya dengan tersedianya data dan informasi

yang akurat dan memadai di desa maka perencanaan pembangunan desa akan menjadi efektif.

Sebagaimana disebutkan dalam PP.72 Tahun 2005 (pasal 65), bahwa perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang mencakup : data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, data dan informasi tentang organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, data dan informasi tentang keuangan desa, data dan informasi tentang profil desa, serta data dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi desa (buku-buku administrasi desa), baik administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, maupun administrasi pembangunan di desa Lemahino belum sepenuhnya efektif, namun sudah cukup baik. Semua buku administrasi desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2006

yaitu Buku Administrasi Umum (8 Model/Buku), Buku Administrasi Penduduk (4 Model/Buku), Buku Administrasi Keuangan (7 Model/Buku), dan Buku Administrasi Pembangunan (4 Model/Buku) sudah ada/tersedia, namun belum semuanya dapat dikelola dengan baik dan efektif. Data dan informasi yang tertuang dalam sebagian buku-buku administrasi desa ada yang tidak lengkap dan tidak akurat lagi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan terbaru/terkini.

2. Efektivitas penyelenggaraan administrasi desa dalam menunjang pembangunan di desa Lemahino cukup baik namun belum maksimal. Ini artinya bahwa penyelenggaraan administrasi desa belum maksimal dapat menunjang pembangunan di desa Lemahino, namun sudah cukup efektif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelenggaraan administrasi desa di desa Lemahino harus ditingkatkan. Dalam hubungan dengan hal tersebut maka yang perlu diperhatikan dan mendesak harus

dilakukan adalah peningkatan SDM aparatur pemerintah desa, pemberian alokasi dana yang memadai, dan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang representatif dan memadai.

2. Perencanaan pembangunan desa harus selalu didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan terkait terutama LPM di dalam penyusunan rencana pembangunan desa harus mengacu pada data yang sudah diolah di dalam buku-buku administrasi desa yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gibson L.J.,dkk, 1996, *Organization*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press.
- Riggs, F.W. 1994, *Administrasi Pembangunan*, terjemahan, LP3ES, Jakarta.
- Pamudji, S., 1996, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987,  
*Pengantar Administrasi  
Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian  
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  
dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Widjaya, HAW. 2002. *Pemerintahan  
Desa dan Administrasi Desa*.  
Rajawali Press. Jakarta.

Miles dan Huberman (1992 : 112)

**Sumber lain:**

Undang-Undang No.32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2008  
Tentang Perubahan Kedua Atas UU  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  
2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
32 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Desa.